

**KOLABORASI *STAKEHOLDERS* DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA WONOYOSO, KECAMATAN
PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG)**

Oleh:

Rizka Ciptaningsih, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso terkendala pada pasifnya pihak desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kolaborasi antar *stakeholders* yang terjalin di Desa Wonoyoso, bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat, dan faktor pendorong serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan subjek menggunakan *teknik purposive sampling* dan *convenience sampling*, validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *stakeholder* yang terjadi di Desa Wonoyoso tidak berjalan dengan baik. *Stakeholders* yang terlibat adalah: pemerintah desa, pemerintah kecamatan, DISPERMADES, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh pihak PUSKESMAS. *Stakeholders* yang kurang aktif adalah pemerintah desa. Dampak dari pemberdayaan diantaranya: partisipasi masyarakat meningkat di bidang ekonomi dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang kerja, jumlah peserta PAUD masih sedikit, dan timbul rasa iri atau ketidakadilan terkait porsi mereka dalam musrendes. Faktor penghambat: pihak desa yang pasif, kesempatan yang minim, tidak ada badan koordinator khusus; Faktor pendukung: pemerintah daerah yang responsif, partisipasi masyarakat yang tinggi, organisasi yang telah memiliki ijin resmi. Saran yang dapat diberikan adalah pembuatan komitmen antara desa dan warga, meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, dan penegasan tupoksi DISPERMADES sebagai koordinator

Kata Kunci: Kolaborasi Stakeholder, Pemberdayaan, Pemerintah Desa Pasif

***COLLABORATION OF STAKEHOLDERS OF COMMUNITY EMPOWERMENT
(CASE STUDY IN WONOYOSO DESA, KECAMATAN PRINGAPUS, SEMARANG
DISTRICT)***

by:

Rizka Ciptaningsih, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment in Wonoyoso village is constrained by the passivity of the village government. This research aims to see collaboration between stakeholders established in Wonoyoso Village, the impact on the community empowerment, and the influencing factors. This research uses a qualitative method with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Determination of research subjects using purposive sampling technique and convenience sampling. The data validity use triangulation techniques. The results of the study show that the stakeholders that occurred in Wonoyoso Village did not work well. The stakeholders involved are: village government, sub-district government, DISPERMADES, DISKOPUMKMPERINDAG, Education Agency and Health Office in this case represented by the PUSKESMAS. The less active stakeholders are the village government. The positive impacts of the empowerment are: The Increasing of community participation in economic and health activities, the increasing of human resources quality, increased employment opportunities through MSME activities, and the negative impacts are: few PAUD's participants, and jealousy or injustice arising in the community associated with involvement in MUSRENDES. Inhibiting factors: passive village parties, minimal opportunities, no coordinating body; Supporting factors: responding local government, high community participation, organizations that have official permission. Suggestions that can be given are: making commitments between the village and residents, increasing the amount of the budget for community empowerment, and enforcing the DISPERMADES roles as the coordinator.

Keywords: Stakeholders Collaboration, Community Empowerment, Passive Village Government

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso diawali oleh adanya pendirian Koperasi Wanita Melati pada tahun 2006, pendirian koperasi ini dilatar belakangi oleh krisis yang dialami masyarakat dimana masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh industri terkena pemutusan hubungan kerja sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Usaha yang dilakukan berawal dengan menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut menjadi pengrajin keset dari kain bekas hingga akhirnya dapat mendirikan koperasi tersebut. Pemberdayaan masyarakat selanjutnya dikembangkan dengan adanya:

1. Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan),
2. Program Kader Posyandu.
3. Program Simpan Pinjam,
4. Program pembentukan UMKM.

Adapun daftar UMKM di Desa Wonoyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah UMKM Desa Wonoyoso berdasarkan Jenisnya

No.	Jenis UMKM	Jumlah
1	Pengolahan Kayu	17
2	Kerajinan	9

No.	Jenis UMKM	Jumlah
3	Makanan Olahan	16
4	Konveksi	4
Jumlah		46

Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber

Pemberdayaan masyarakat yang berjalan di Desa Wonoyoso didukung oleh pemerintah daerah dengan memberikan beberapa bantuan sebagai berikut:

Tabel 2
Data Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso

Jenis Bantuan	Asal	Tahun
Pembinaan UP2K	Disperindag Kab. Semarang	Setiap Tahun
Pembinaan UKM	Disperindag Kab. Semarang	Setiap Tahun
Pelatihan menghias nasi kuning	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Setiap tahun
Penyuluhan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Setiap tahun
Dana PKK	Dana Desa	2018
Dana Pemberdayaan	Dana Desa	2018
Pelatihan Merangkai Sayuran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	2018
Pelatihan Merangkai Empon – empon	Dinas Pemberdayaan	2018

Jenis Bantuan	Asal	Tahun
	Masyarakat dan desa	
Pelatihan olahan bahan baku non beras	Dinas Pertanian Kab. Semarang	2018
Perpustakaan desa	Dinas Perpustakaan Kab. Semarang	2018
Pelatihan pengeolahan limbah industri	Disperindag Kab. Semarang	2018
Pelatihan Menghias Hantaran Pernikahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	2017
Pelatihan Pembuatan abon dari lele	Disperindag Kab. Semarang	2017
Pelatihan pembuatan bros	Disperindag Kab. Semarang	2017
Pelatihan olahan bahan baku non beras	Dinas Pertanian Kab. Semarang	2017
Perpustakaan desa	Dinas Perpustakaan Kab. Semarang	2017
Pelatihan pengeolahan limbah industri	Disperindag Kab. Semarang	2017
Pelatihan pembuatan kalung dari limbah	Disperindag Kab. Semarang	2017
Pelatihan pembuatan sarung bantal hias dari limbah industri	Disperindag Kab. Semarang	2017

Sumber: hasil olahan dari berbagai sumber

Kegiatan pemberdayaan yang berjalan mulai menemui kendala seiring dengan berjalannya waktu, adapun permasalahan – permasalahan tersebut datang dari berbagai aspek, adapun permasalahan – permasalahan tersebut diantaranya:

1. Partisipasi pihak desa yang mulai menurun.
2. Tingkat ketergantungan masyarakat yang masih tinggi
3. Manajemen bantuan yang kurang baik, dan diperparah sikap individualis warga.
4. Pelayanan pemerintah desa pada masyarakat yang kurang maksimal.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa koordinasi, kerjasama, komunikasi dan *networking* masih belum terlihat maksimal karena tidak adanya badan yang mengkoordinir penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dari keempat permasalahan tersebut permasalahan yang sangat menonjol adalah tentang kepasifan pemerintah desa dan pelayanan pemerintah desa yang kurang maksimal.

Permasalahan yang diuraikan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kolaborasi stakeholders yang terbentuk, dampaknya terhadap

pemberdayaan masyarakat, serta faktor penghambat dan faktor pendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso.

B. KAJIAN TEORI

2.1 Administrasi Publik

menurut G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2008: 37 – 38) adapun pergeseran tersebut adalah sebagai berikut

- a. *Traditional public administration*
- b. *Public Management*
- c. *New Public Management*
- d. *Governance*

Paradigma administrasi public dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan apa yang akan dibahas, karena kolaborasi stakeholders dalam penelitian ini merupakan bagian dari *good governance*. *Good governance* sendiri terdapat dalam paradigm NPM yang didalamnya terdapat prinsip pemberdayaan.

2.2. Manajemen Publik

Manajemen publik seringkali dipahami sebagai manajemen pemerintahan, lebih lanjut Safroni mengutip pendapat dari Shafritz, Hyde dan Ott (Safroni,2012) memberikan definisi bahwa manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non-SDM sesuai dengan perintah kebijakan publik.

2.3. Kolaborasi Stakeholder

kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014)

Kolaborasi mengandung unsur – unsur pembangunan yang dapat disinergikan diantaranya (Salman, 2012):

1. *Resources* (Sumber Daya) terdiri dari pendataan jenis jumlah, kondisi sumber daya alam, finansial, manusia, hingga sumber daya fisik yang dimiliki.
2. *Organization* (Organisasi): yakni organisasi atau pelaku yang melaksanakan peran dengan cara memadukan dan mengintegrasikan berbagai sumber daya.
3. *Norms* (Norma): hal ini berkaitan dengan nilai- nilai atau prinsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, berkaitan dengan tingkat penghargaan terhadap mekanisme.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah suatu peningkatan kemampuan yang

sesungguhnya potensinya ada. Menurut Sedarmayanti (Sukino 2013:61)

Teori mengenai tahap pemberdayaan yang lain yakni tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (Wrihatnolo : 2007) sebagai berikut :Tahap Penyadaran, Tahap pengkapasitasan, Tahap Pendayaan
Pemberdayaan masyarakat juga dapat diukur melalui 3 aspek (Djamaludin, 2017):

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas/kemampuan masyarakat dilihat dari 3 level yakni: Level individu, Level organisasi/kelembagaan, Level masyarakat
- 3) Penguatan Kelembagaan

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan subjek menggunakan *teknik purposive sampling* dan *convenience sampling*, validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

D. PEMBAHASAN

4.1.Keterlibatan Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wonoyoso

Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Kolaborasi menurut Salman (2012:140-141) merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan dimana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tahap – tahap pencapaian tujuan bersama, adapun unsur – unsurnya meliputi *Resources*, *Organization*, dan *Norms*. Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan (Wrihatnolo, 2007).

Analisis keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat Desa Wonoyoso selanjutnya diklasifikasikan sesuai kontribusi yang diberikan. *Stakeholders* paling banyak terlibat ada pada tahap pengkapasitasan, yakni 6 *stakeholders*. Keterlibatan stakeholders dalam setiap tahap selanjutnya digambarkan melalui matriks berikut:

Tabel 3.
Matriks Keterlibatan Stakeholders dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wonoyoso

STAKEHOLDER	TAHAP									
	Penyadaran			Pengkapasitan			Pendayaan			
	Resources	Organization	Norm	Resources	Organization	Norm	Resources	Organization	Norm	
Pemerintah Desa	Dana desa	-	-	Bangunan PAUD	pembentukan PAUD	-	pembentukan UPIK	pelibatan dalam musyawarah	-	-
Pemerintah Kecamatan	-	-	himbauan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat	-	fasilitasi pembuatan IUM, mediator dengan pihak dinas	kemandirian masyarakat	petugas pelayanan	pelayanan keluhan masyarakat	-	-
DISPERM ADES	petugas DISPERM ADES	-	penanaman nilai kemandirian melalui pengesahan BUMDES	Petugas DISPERM ADES, Permodalan BUMDES	pembentukan BUMDES	-	Petugas DISPERM ADES	pelayanan keluhan masyarakat	-	-
Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	Edaran penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi desa	bantuan alat, bantuan modal, narasumber	pendirian koperasi	-	-	pelayanan aduan, forum pertemuan UMKM	-	-
					pembinaan dan pelatihan					
Dinas Pendidikan	-	-	-	Bantuan pembangunan gedung PAUD, BOP rutin,	Pelatihan, seminar dan uji kompetensi	-	Petugas Dinas Pendidikan	Pengawasan	-	-
PUSKESMAS	-	Poyandu	sosialisasi kesehatan	Petugas PUSKESMAS, Bidan, bantuan dana kader poyandu	Pelatihan Kader Poyandu,	-	-	-	-	-

Tabel 4.1 mengenai partisipasi melalui kontribusi Sumberdaya (R), Organisasi (O), dan Norma (N), maka kolaborasi dalam tahap pemberdayaan yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Penyadaran, unsur yang diberikan oleh masing – masing *stakeholders* didominasi unsur

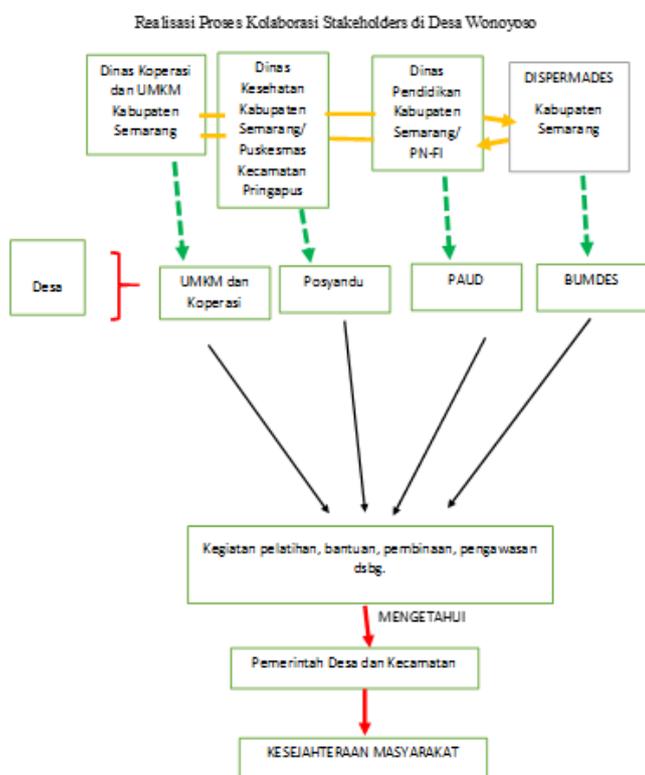
Norma yang terdiri dari himbauan penggunaan dana desa, penanaman nilai kemandirian, edaran mengenai pengembangan potensi, dan sosialisasi kesehatan. Unsur lain yang diberikan dalam tahap ini adalah unsur sumberdaya (R) berupa tenaga pendamping dan dana untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

2) Tahap Pengkapsitan, dalam tahap ini unsur yang mendominasi adalah unsur Sumberdaya (R) dan unsur Organisasi (O). Unsur Sumberdaya (R) terdiri dari pendirian bangunan PAUD, Penerjunan petugas pendamping, bantuan berupa dana dan peralatan. Sedangkan unsur Organisasi terdiri dari: Organisasi PAUD, pembuatan Ijin Usaha Mikro bagi anggota UMKM, Pembentukan BUMDES, Pendirian Koperasi, penyelenggaraan pelatihan – pelatihan baik dari Dinas Koperasi dan UMKM hingga Pihak Puskesmas. Unsur Norma (N) tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan.

3) Tahap Pendayaan, dalam tahap ini tidak ada kontribusi dalam unsur Norma (N) sama sekali. Semua berfokus pada kontribusi terhadap Unsur R dan O. Unsur R didominasi

dengan penerjunan petugas untuk mengawasi jalannya pemberdayaan sedangkan unsur Organisasi didominasi oleh penyediaan pelayanan aspirasi masyarakat.

Kolaborasi stakeholders yang terjadi di Desa Wonoyoso berdasarkan analisis hasil penelitian mendapatkan gambaran sebagai berikut :



Sumber: Hasil Wawancara dengan pihak DispermaDes, 2018

Tambahan Keterangan:

---> : Fasilitator, Pendampingan

gambar 4.1 memperlihatkan dimana garis koordinasi antara pemerintah dengan dinas – dinas tidak ada atau hilang, hal ini dikarenakan pasifnya pemerintah desa dalam berkoordinasi maupun pengawasan yang terjadi. Koordinasi yang terjalin antar dinas

berjalan dengan lancar melalui forum Komunikasi pimpinan daerah. Kolaborasi yang terjadi antar stakeholder dapat terlihat berdasarkan garis koordinasi yang seharusnya, namun dalam gambar 4.1 garis koordinasi antara desa ke dinas hilang.

4.2.Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) aspek (Djamaludin,2017) untuk melihat bagaimana penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso memberikan dampaknya pada masyarakat Desa Wonoyoso. Tiga (3) indikator yang menggambarkan perkembangan masyarakat Desa Wonoyoso adalah:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Wonoyoso dalam kegiatan – kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat: anggota tetap koperasi dari yang tadinya 10 menjadi 20-50 orang, kemudian anggota umum koperasi sudah mencapai 500 orang, dai UMKM muncul usaha – usaha baru seperti usaha rajut dan aksesoris, kehadiran dalam

posyandu sudah mencapai 10 – 20 orang.

Dampak lain yang timbul adalah:

1. Masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan terutama terkait kesehatan ibu hamil, rata – rata dalam setiap posyandu minimal ada 2 – 3 orang yang sudah sadar untuk melakukan konseling.
2. Membuka peluang kerja melalui kegiatan UMKM
3. Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan terutama kemampuan dalam berkomunikasi ketika hadir dalam forum Musrendes.
4. Dalam bidang pendidikan baru sebagian kecil yang sadar akan pentingnya pendidikan.

2. Peningkatan Kapasitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas telah dilakukan secara maksimal oleh stakeholders terkait dan dari masyarakat sendiri, namun demikian dalam upaya peningkatan kapasitas ini lagi – lagi pihak desa tidak terlibat secara maksimal. Analisis dari upaya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonoyoso memberikan hasil bahwa upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan pelatihan, pembinaan, dan uji kompetensi
2. Memfasilitasi keperluan yang di butuhkan dalam pemberdayaan masyarakat
3. Pendampingan secara berkelanjutan

Upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang positif, masyarakat Desa Wonoyoso mengalami peningkatan kualitas SDM, yang memunculkan adanya usaha – usaha baru seperti pembuatan sandal dan emping jagung.

4. Penguatan Kelembagaan

Kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wonoyoso seluruh kegiatannya telah memiliki wadah masing – masing sesuai bidang pemberdayaan, seperti:

- a. Bidang Ekonomi di wadahi dengan pembentukan koperasi dan UMKM yang semuanya telah diakui pemerintah desa dan daerah dan beberapa diantaranya telah memiliki ijin yang sah.
- b. Bidang pendidikan juga telah mengalami penguatan kelembagaan melalui SK Kemenkumham.
- c. Bidang kesehatan juga tidak luput dari upaya penguatan kelembagaan berupa pengakuan dari PUSKESMAS

Penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait membawa dampak positif berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada, keberlangsungan tersebut lebih terjamin karena organisasi – organisasi yang ada telah diakui secara hukum dan mendapat dukungan dari lembaga pemerintah daerah. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja bukan menyelenggarakan, semua tetap bertumpu pada pemerintah desa. BUMDES yang tidak aktif terbukti dengan tidak tahunya beberapa narasumber dari masyarakat desa dapat menjadi masalah dikemudian hari.

Kemudian, porsi perhatian desa pada tiap bidang pemberdayaan masyarakat tidak merata, hal ini dapat ditemui dari beberapa pernyataan bahwa ada yang diberi undangan sebagai perwakilan dari salah satu bidang untuk mengikuti Murendes, sedangkan bidang lain menyatakan mereka tidak mendapat undangan atau hanya mendapat undangan sebagai warga biasa, kemudian kehadiran mereka terkadang tidak dipertimbangkan oleh pihak Desa.

4.3.Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wonoyoso

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan

masyarakat di Desa Wonoyoso dalam kaitannya dengan kolaborasi *stakeholders* yang ada, ditemukan beberapa faktor, adapun faktor – faktor tersebut adalah:

1) Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat jalannya pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso adalah:

1. Pihak desa yang pasif dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan penunjang pemberdayaan masyarakat, Hal ini ditemukan hampir diseluruh pernyataan yang diberikan oleh narasumber mulai dari pihak desa tidak memberikan bantuan dan fasilitas, koordinasi yang tidak berkelanjutan, hingga tidak adanya pendampingan atau pengawasan dari desa.
2. Minimnya kesempatan dari desa, minimnya kesempatan disini terkait dengan kesempatan untuk pemasaran bagi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. Desa jarang sekali mengadakan acara yang memberikan kesempatan pada masyarakat Desa Wonoyoso untuk memperkenalkan produknya pada konsumen.
3. Tidak adanya badan koordinator khusus yang mengkoordinir Dinas – Dinas dalam memberikan bantuan

dan fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas – dinas memiliki tanggung jawab dalam bidang yang berbeda – beda akan tetapi tidak ada yang menjadi koordinator yang mendaftarkan apa yang telah dilakukan dinas – dinas terkait sehingga rawan timbul tumpang tindih dalam pemberian bantuan.

2) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso berdasarkan hasil analisis hasil wawancara dan observasi peneliti adalah:

1. Pemerintah Daerah yang responsif
Hasil penelitian memberikan temuan bahwa selama ini yang sering kali terlibat dalam pemberdayaan masyarakat justru pemerintah daerah melalui dinas – dinas terkait. Respon yang cepat dari dinas terkait memperlancar kegiatan pemberdayaan yang ada sehingga banyak kelompok yang bisa berkembang.
2. Masyarakat yang aktif
Hasil penelitian menemukan bahwa peran masyarakat melalui kader – kader pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, dari pernyataan beberapa narasumber terlihat inisiatif

masyarakat mulai meningkat, ketika desa kurang dalam hal kerjasama para kader langsung berkonsultasi dengan dinas terkait sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat.

3. Organisasi yang sudah memiliki ijin resmi

Ijin resmi yang dimiliki organisasi sebagai wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Koperasi yang sudah berbadan hukum, beberapa usaha yang telah memiliki ijin dalam kelompok UMKM, dan PAUD yang sudah terintegrasi meningkatkan kemudahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wonoyoso.

E. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kolaborasi stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso berlangsung sebagai berikut:

- a. Proses kolaborasi melibatkan: pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dinas Koperasi dan UMKM, DISPERMADES, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas
- b. Stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kontribusi *Resources (R), Organization (O),*

dan Norm (N) dengan rincian: pada tahap pertama unsur yang mendominasi adalah unsur norma, tahap kedua didominasi oleh unsur *Resources* dan *Organization*, sedangkan ditahap ketiga unsur yang dominan adalah unsur *Resources* dan *Organization* juga.

Desa Wonoyoso berlangsung sebagai berikut:

- 1) Proses kolaborasi melibatkan: pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dinas Koperasi dan UMKM, DISPERMADES, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas
- 2) Stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kontribusi *Resources (R)*, *Organization (O)*, dan *Norm (N)* dengan rincian: pada tahap pertama unsur yang mendominasi adalah unsur norma, tahap kedua didominasi oleh unsur *Resources* dan *Organization*, sedangkan ditahap ketiga unsur yang dominan adalah unsur *Resources* dan *Organization* juga.
- 3) Dalam garis koordinasi dalam proses kolaborasi, terdapat satu garis kolaborasi yang hilang yakni garis koordinasi Pemerintah Desa ke Dinas – dinas terkait, karena pasifnya Desa dalam berkoordinasi.

- c. Dalam garis koordinasi dalam proses kolaborasi, terdapat satu garis kolaborasi yang hilang yakni garis koordinasi Pemerintah Desa ke Dinas – dinas terkait, karena pasifnya Desa dalam berkoordinasi.

Kolaborasi yang terjadi memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Dampak Positif: (1) Peningkatan partisipasi masyarakat: partisipasi masyarakat meningkat dibidang ekonomi dan kesehatan. (2) Peningkatan Kapasitas: Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), Membuka peluang kerja melalui kegiatan UMKM, (3) Penguatan Kelembagaan: terjaminnya keberlangsungan kegiatan dalam kelompok atau organisasi
- 2) Dampak Negatif: (1) Peningkatan partisipasi masyarakat: Peserta PAUD baru, (2) Peningkatan Kapasitas: Timbul rasa iri atau ketidakadilan dalam masyarakat terkait porsi mereka dalam Musrendes.

Keberlangsungan pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso dipengaruhi oleh berbagai faktor, hasil

analisis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pemberdayaan masyarakat ini adalah:

1. Faktor Penghambat: (1) Pihak desa yang pasif dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan penunjang pemberdayaan masyarakat, (2) Minimnya kesempatan dari desa, (3) Tidak adanya badan koordinator khusus yang mengkoordinir Dinas – Dinas dalam memberikan bantuan dan fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Faktor Pendukung: (1) Pemerintah Daerah (dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM, DISPERMADES, Dinas Pendidikan, Puskesmas) yang responsif, (2) Masyarakat yang aktif, (3) Organisasi yang sudah memiliki ijin resmi

5.2. Saran

Keberlangsungan pemberdayaan masyarakat penting untuk dijaga, adapun saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian dan dalam upaya menjaga keberlangsungan pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso adalah:

1. Untuk menangani permasalahan terkait Pihak desa yang pasif dalam

penyelenggaraan kegiatan – kegiatan penunjang pemberdayaan masyarakat, saran yang dapat diberikan adalah Meningkatkan komitmen desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui penanda tangan surat perjanjian dengan warga terkait komitmen bersama, sehingga warga dapat menuntut keaktifan desa berdasarkan surat tersebut.

2. Saran yang dapat diberikan terkait minimnya kesempatan dari desa adalah Meningkatkan jumlah anggaran dalam dana desa untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setidaknya sebesar 30% yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan secara rutin, *motivation training*, penyediaan fasilitas akomodasi, dan bantuan yang diperlukan.
3. Hambatan selanjutnya adalah tidak adanya badan koordinator khusus yang mengkoordinir Dinas – Dinas dalam memberikan

bantuan dan fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, maka saran yang dapat diberikan untuk menangani hambatan ini adalah perlu adanya penegasan terkait DISPERMADES untuk dijadikan sebagai dinas yang memiliki wewenang untuk mengkoordinir seluruh kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh dinas – dinas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaludin. (2017). *Kolaborasi Multi Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis Undang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)*.
- Sukino. 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan* *Desertasi* (pp. 39 - 40). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2014). *Koordinasi dan Kolaborasi, Bahan Ajar Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat V. Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah tingkat IV* (pp. 18 - 21). Jakarta: Badan Diklat DIY.
- Safroni, 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Salman, D. (2012). *Manajemen Perencanaan berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta Peran Fasilitator*. Makassar: Sulawesi Capacity Development Project KerjasamaKemendagri dan JICA.
- Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- <https://jateng.bps.go.id>
<https://jateng.bps.go.id>
semarangkab.bps.go.id (Data Strategis Kecamatan Pringapus 2016)

